

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Ujian Sarjana Akuntansi
Program Studi S1 Akuntansi

PEBYANTI MAULANI

NPM : C10160126



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

BANDUNG

(2020)

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang)

PEBYANTI MAULANI

NPM : C10160126

Bandung, 10 Maret 2020

Pembimbing



Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak.

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS



Prof. Dr.rer.nat M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi



Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak.,CA

Tanggung Jawab Yuridis Ada Pada Peneliti

PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan nama jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar isi.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 29 Januari 2020

Pebyanti Maulani

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang)**

Oleh:

Pebyanti Maulani

Pembimbing:

Hery Syaerul Homan, S. Pd., M. Pd., M. Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa sebagai variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Penelitian dilakukan di semua desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang berjumlah 12 desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 135 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa pada 12 desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang berada dalam keadaan sangat baik dengan presentase 84% dan akuntabilitas pengelolaan desa pada 12 desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten sumedang dalam keadaan sangat baik dengan 87%. Hasil penelitian juga menunjukkan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan presentase 55,7%. Semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

**THE EFFECT OF VILLAGE APARATURE COMPETENCE IN THE
ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT
(Study of 12 Villages in Tanjungsari District Sumedang Regency)**

By:

Pebyanti Maulani

Advisor:

Hery Syaerul Homan, S. Pd., M. Pd., M. Ak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village apparatus competence as an independent variable on accountability of village financial management as the dependent variable. The study was conducted in all villages in Tanjungsari Subdistrict, Sumedang Regency, totaling 12 villages.

The method used in this research is descriptive with quantitative and verification approaches. The population in this study were 135 respondents. The analytical method used in this study is simple linear regression.

The results of this study indicate that the competence of village officials in 12 villages in Tanjungsari Subdistrict, Sumedang Regency is in very good condition with a percentage of 84% and accountability for village management in 12 villages in Tanjungsari Subdistrict, Sumedang Regency is in very good condition with 87%. The results also showed the competence of village apparatus influences the accountability of village financial management with a percentage of 55.7%. The better the competency of the village apparatus, the more accountable the village financial management will be.

Keywords: *Competence of Village Apparatus, Village Financial Management Accountability.*

KATA PENGANTAR

Diawali dengan *Bismillahirrahmanirrohim*, dan diakhiri dengan *Alhamdulillahilabbil'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dengan segala kesalahan dan keterbatasan. Namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah kesempurnaan penyusunan, baik dari segi isi maupun teknik penulisannya akan penulis terima dengan senang hati.

Begitu banyak pihak yang turut memberikan bantuan, dukungan, semangat, bimbingan serta kritik dalam penyusunan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Mulyana dan Ibu Cahyati, Nenek saya Nenek Rukasih, beserta Adik saya Rizky Agung Laksana dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, nasihat, dan dukungannya, baik secara materil maupun secara moril yang tidak akan pernah ternilai.
2. Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP. selaku Rektor STIE EKUITAS.
3. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM. Selaku Wakil Ketua I STIE EKUITAS.

4. Dr. Herry Achmad Buchory, SE.,MM. Selaku Wakil KetuaII STIE EKUITAS.
5. Dr. Sudi Rahayu, SE.,MM. Selaku Wakil Ketua III STIE EKUITAS.
6. Dwi Puryati, SE, M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi (S1) Akuntansi.
7. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M. Ak selaku Sekretaris Program Studi (S1) Akuntansi dan dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, nasihat, semangat serta bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dani Ramdani, SE., M.Ak selaku dosen wali yang selalu mendukung, memberikan pengarahan, serta ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh dosen pengajar Program Studi Akuntansi STIE EKUITAS yang telah meluangkan waktunya dalam membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini
10. Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Seluruh Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan kuesioner.
12. Seluruh staf dan karyawan yang bertugas di lingkungan kampus STIE EKUITAS.

13. Sahabat Nisa Nur Insyiroh, Fitri Rodiah, Puti Yayu Saginah, Mayangsari Kusuma Ningrum, Muhammad Haryana yang selalu memberikan do'a, motivasi serta semangat.
14. Sahabat Meilani Nur Lisdiyanti, Widya Gusliani serta Rahma Sadely yang selalu memberikan do'a, semangat serta motivasi.
15. Kintan Aulia yang telah memabantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman satu bimbingan yang telah saling membantu dalam penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuangan program studi S1 Akuntansi yang telah memberikan banyak informasi-informasi yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
18. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan laporan ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala amal kebaikan dan bantuan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis sampaikan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan membutuhkannya, khususnya bagi penulis dan kita semua pada umumnya.

Bandung, 29 Januari 2020

Penulis

Pebyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

HALAMAN JUDUL vi

LEMBAR PENGESAHAN vi

LEMBAR PERNYATAAN vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Kegunaan Penelitian..... 8

1.2.1 Kagunaan Teoritis 8

1.2.2 Kegunaan Praktis..... 9

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN 10

2.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa 10

2.1.1 Pengertian Kompetensi 10

2.1.1.1 Karakteristik Kompetensi..... 11

2.1.1.2 Tipe Kompetensi 12

2.1.1.3 Indikator Kompetensi 14

2.1.2 Pengertian Aparatur Desa..... 14

2.1.3 Akuntabilitas 15

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas	15
2.1.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas	16
2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas.....	17
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa	18
2.1.4.1 Pengertian Pengelolaan	18
2.1.4.2 Fungsi Pengelolaan	19
2.1.4.3 Pengertian Keuangan Desa.....	20
2.1.4.4 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.1.4.5 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.1.4.6 Struktur Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.1.4.7 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	22
2.2 Kerangka Pemikiran.....	27
2.3 Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1 Objek Penelitian	35
3.1.1 Gambaran Umum	35
3.1.1.1 Visi dan Misi Kecamatan Tanjungsari	35
3.1.1.2 Kondisi Eksisting Kecamatan Tanjungsari	37
3.2 Metode Penelitian.....	39
3.2.1 Metode Yang Digunakan	39
3.2.2 Oprasionalisasi Variabel Penelitian	40
3.2.3 Populasi	43
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	44
3.2.4.1 Teknik Pengumpulan Data	44
3.2.4.2 Sumber Data.....	45
3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis	45
3.2.5.1 Uji Instrumen.....	45
3.2.5.2 Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian	52
4.1.1 Uji Validitas	52
4.1.2 Uji Reliabilitas.....	55

4.1.3	Gambaran Umum Responden	56
4.2	Hasil Tanggapan Responden Terhadap Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	58
4.2.1	Tanggapan Responden Terhadap Kompetensi Aparatur Desa di 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.....	59
4.2.2	Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	60
4.2.3	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	62
4.2.3.1	Analisis Regresi Linier Sederhana	62
4.2.3.2	Koefisien Korelasi.....	63
4.2.3.4	Korelasi Determinasi.....	64
4.2.3.5	Pengujian Hipotesis (Uji t).....	64
4.3	Pembahasan.....	66
4.3.1	Kompetensi Aparatur Desa Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.....	66
4.3.2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.....	67
4.3.3	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.....	69
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Kawasan Desa lingkup Kecamatan Tanjungsari.....	39
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	41
Tabel 3.3 Daftar Aparatur Desa di Desa-Desa di Kecamatan Tanjungsari..	44
Tabel 3.4 Nilai dan Tingkat Realibilitas	47
Tabel 3.5 Korelasi Pengaruh Antara kedua Variabel.....	49
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Nilai Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X)	53
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Nilai Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).....	54
Table 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X).	55
Table 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	55
Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Umur	56
Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	57
Tebel 4.8 Data Responden Berdasarkan Masa Bekerja	57
Tabel 4.9 Kriteria Presentase Skor Jawaban Responden	58
Tabel 4.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kompetensi Aparatur Desa.....	59

Tabel 4.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	60
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Regresi X terhadap Y	62
Tabel 4.13 Koefisien Korelasi	63
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi.....	64
Tabel 4.15 Uji Hipotesis Parsial (Uji t).....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian.....	33
Gambar 3.1 Peta Kecamatan Tanjungsari.....	38
Gambar 4.1 Interval Skor Penilaian Kompetensi Aparatur Desa	60
Gambar 4.2 Interval Skor Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Rekapitulasi Kuesioner
- Lampiran 3 : Hasil Pengolahan Data
- Lampiran 4 : Tabel t
- Lampiran 5 : Tabel r
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Ekuitas Tentang Penetapan Pembimbingan Penyusunan Dan
Penulisan Skripsi Mahasiswa STIE EKUITAS
- Lampiran 7 : Photocopy Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Wawancara, Kuesioner & Observasi
- Lampiran 10 : Surat Konfirmasi izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Konfirmasi izin Wawancara, Kuesioner & Observasi
- Lampiran 12 : Surat Permohonan Perubahan Judul
- Lampiran 13 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara tepat dan terencana. Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan dilaksanakan melalui perencanaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Perencanaan pembangunan di atur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Pembangunan Nasional terdiri dari pembangunan daerah, pembangunan kota, dan pembangunan desa. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan antara laju pembangunan daerah, pembangunan kota, serta pembangunan desa yang diharapkan dapat seimbang. Namun pada pelaksanaannya masih ada ketimpangan pembangunan baik itu antar daerah dan kota maupun antar kota dan desa. Ketimpangan yang terjadi salah satunya akibat dari pembangunan yang tidak merata sehingga menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019 tingkat kemiskinan di perkotaan mencapai 6,69% sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan angkanya jauh lebih tinggi yaitu mencapai 12,85%.

Menghadapi permasalahan ketimpangan yang terjadi antara kota dan desa pemerintah menerapkan strategi dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Salah satu wujud dari perhatian tersebut ditempuh dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan

disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat dipenuhi dan dikelola dengan baik. Pemberian kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan pembangunan antar wilayah, kemiskinan, dan lain sebagainya dapat diminimalisir.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 menyatakan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa, yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam pengelolaannya, pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan Desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Dengan adanya anggaran desa yang besar, dalam pelaksanaan pemerintah desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) akuntabilitas adalah suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting dan menjadi sebuah control penuh aparatur desa atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan sehingga peran pemerintah desa selaku agen yang mengelola keuangan desa menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan kepada prinsipal atau masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 72 Ayat (1) menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Dan di Ayat (2) menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Laporan realisasi APB Desa
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- d. Sisa anggaran; dan
- e. Alamat pengaduan

Namun dengan kebijakan desa mengatur rumah tangganya sendiri banyak menimbulkan khawatir dikarenakan belum semua aparatur pemerintah desa memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan saat ini, yang awalnya pengelolaan keuangan bersifat sentralisasi namun saat ini pengelolaannya telah dilakukan secara mandiri atau bersifat desentralisasi yang pengelolannya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah. Dimana untuk mengelola dana desa yang besar diperlukan aparatur desa yang memiliki kompetensi dibidangnya. Aparatur yang memiliki kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Seperti yang dikatakan Moeheriono (2014) kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Kompetensi seseorang termasuk kedalam kategori tinggi atau baik nantinya akan dibuktikan dan ditunjukkan, apabila ia sudah melakukan

pekerjaan (sudah bekerja). Sebaliknya , apabila sudah mempunyai kompetensi tingkat rendah ia akan cenderung berkinerja rendah pula (Moehariono 2014)

Menurut Cheng, *et al* dalam Widyatama,dkk (2017) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Sama halnya menurut Dwi Sapartiningsih,dkk (2018) mengatakan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana desa. Dan menurut Mualifu,dkk (2019) yaitu kompetensi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, menurut Ibu Yayah Wariah selaku kaur keuangan mengatakan terdapat masalah dalam pengelolaan laporan keuangan yaitu adanya keterlambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban laporan keuangan. Dengan adanya masalah tersebut akan berdampak pada terhambatnya proses pelaporan pertanggungjawaban laporan keuangan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui camat, serta menurut Bapak Dedi Karnawan selaku kaur dan kasi mengatakan belum adanya media informasi seperti web desa yang memadai untuk masyarakat mengetahui pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dimana itu semua mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui pengelolaan laporan keuangan secara keseluruhan. Adapun baliho tentang APB Desa itu tidak memuat semua informasi yang berhak diterima oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 72 Ayat (2) dimana paling sedikit memuat tentang laporan realisasi

APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Adapun baliho APB Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang tersedia yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Sumber : Pemerintah Desa Pasigaran

Uraian	Jumlah
Pendapatan	
Pendapatan Transfer:	Rp.1470.943.000
Dana Desa	Rp. 782.473.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 489.499.000
DBH Pajak Retribusi	Rp. 71.683.000
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 127.288.000
PADesa	Rp. 6.000.000
Total Pendapatan	Rp.1.476.943.000
Belanja	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (36%)	Rp. 541.352.700
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (58%)	Rp. 880.199.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (4%)	Rp. 60.683.500
Bidang Pemberdayaan Masyarakat (2%)	Rp. 33.099.000
Total Belanja	Rp.1.515.334.200
Surplus/(Defisit)	Rp. 38.391.200
Pembiayaan Desa	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 38.391.200
Total Pembiayaan Desa	Rp. 38.391.200

Sumber : Pemerintah Desa Pasigaran

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2019 mengalami defisit sebesar RP.

38.391.200 hal itu disebabkan karena belanja desa lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh desa. Dimana belanja desa mencapai Rp. 1.515.334.200 yang terdiri dari belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.541.352.700, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.880.199.000, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar RP.60.683.500, bidang pemerdayaan masyarakat sebesar Rp.33.099.000, sedangkan pendapatan yang diterima hanya sebesar Rp.1.476.943.000 yang terdiri dari dana desa sebesar Rp.782.473.000, alokasi dana desa sebesar Rp.489.499.000, DBH pajak retribusi sebesar Rp.71.683.000, bantuan keuangan provinsi sebesar Rp.127.288.000, dan PADesa sebesar RP.6.000.000, sehingga terjdinya defisit.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan terkait penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi aparatur desa pada desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

3. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi aparatur desa pada Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

1.4 Kegunaan Penelitian

1.2.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi khususnya pada materi akuntansi pemerintahan.

1.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi instansi, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam hal kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, khususnya pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa

2.1.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Boyatzis dalam Suparyadi (2015:242) mengemukakan kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang dapat membuat orang tersebut yang mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian Wyatt dalam Suparyadi (2015:243) mengemukakan kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan perestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Menurut Wibowo (2016:271) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dan Priansa (2017) mengemukakan bahwa kompetensi adalah peta kapasitas pegawai atas atribut pekerjaan yang diembannya, yang merupakan kumpulan, kemampuan, keterampilan, kematangan, pengalaman, keefektifan, keefisienan, dan kesuksesan dalam mengemban tanggung jawab pekerjaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan seseorang yang didasari dengan

keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam mengemban tanggung jawab pekerjaan dalam suatu organisasi tersebut sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai.

2.1.1.1 Karakteristik Kompetensi

Menurut Wibowo (2016:273) terdapat lima tipe karakteristik dalam kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur.
3. Konsep Diri adalah sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. Skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya yang dipergunakan dalam pekerjaan.

Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

2.1.1.2 Tipe Kompetensi

Menurut Wibowo (2016:275) tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, beberapa Tipe Kompetensi sebagai berikut :

1. *Planing Competency*, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
2. *Influence Competency*, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional.
3. *Comunication Competency*, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal
4. *Interpersonal Competency*, meliputi: empati, membangun konsensus, networking, persuasi, negoisasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi team player.
5. *Thinking Competency*, berkenaan dengan: berpikir strategis, berpikir analistis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.
6. *Organizational competency*, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan dilakukan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.

7. *Human Resources Management Competency*, merupakan kemampuan dalam bidang : Team building, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.
8. *Leadership Competency*, merupakan Kompetensi meliputi kecakapan memosisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan memelopori kesehatan tempat kerja.
9. *Client Service Competency*, merupakan Kompetensi berupa: mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.
10. *Business Competency*, merupakan Kompetensi yang meliputi : manajemen Finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.
11. *Self Management Competency*, Kompetensi berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.
12. *Technical/Operasional Competency*, Kompetensi berkaitan dengan mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.

2.1.1.3 Indikator Kompetensi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 22 Tahun 2011 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mencakup dimensi:

1. Pengetahuan (*Knowledge*) yang meliputi ilmu akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan terkait lainnya, pengetahuan mengenai kegiatan bisnis atau sector public dan pengorganisasian, pengetahuan dan kompetensi dibidang teknologi informasi.
2. Keterampilan (*Skill*) meliputi keterampilan teknis dan fungsional, keterampilan intelektual, keterampilan berorganisasi, keterampilan personal, keterampilan komunikasi dan intrapersonal.
3. Sikap (*attitude*) memiliki komitmen dan sensitifitas terhadap tanggungjawab social, pengembangan diri dan belajar terus menerus, dapat diandalkan, bertanggungjawab, tepat waktu dan saling menghargai hukum dan peraturan berlaku.

2.1.2 Pengertian Aparatur Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) pengertian aparatur sebagai berikut:

“Aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri); negara alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari; pemerintah pegawai negeri; alat negara; aparatur negara”

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa yaitu sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan suatu kemampuan yang dimiliki pegawai pemerintah yang didasari dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam mengemban tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa sehingga menghasilkan kinerja yang baik dan dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Kusumastuti (2014) adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Menurut Sujarweni (2015:28) mendefinisikan akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.”

Menurut Mahsun dkk. (2016) akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab? Dalam pengertian luas , akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban , menyajikan , melaporkan , dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak

dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik.”

Kemudian menurut Krina dalam Rakhmat (2018:141) akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak pelaksana atau pemegang amanah (*agent*) atas segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan menyangkut seluruh keputusan dan proses yang telah dilakukan kepada pihak pemberi amanah (*principal*)

2.1.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik terdiri dari dua macam menurut Mahmudi (2015:9) yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*).

Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasanbawahan.

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator dan dimensi Akuntabilitas Menurut Hopwood dan Tomkins dalam Rakhmat (2018:145) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik , yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*law and honesty accountability*)
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, tidak terjadi malapraktik dan malaadministrasi.
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*) Akuntabilitas proses terkait dengan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan akuntabilitas sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan biaya murah.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal, lembaga-

lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan memepertimbangkan dampak di masa depan.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.4.1 Pengertian Pengelolaan

Menurut Aziz dkk. (2014) Pengelolaan atau Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Dalam organisasi, manajemen mengatur sumber daya organisasi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Abdullah (2014) pengertian manajemen yaitu sebagai berikut:

“Manajemen itu adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi (*man, money, material, mechine and method*) secara efisien dan efektif.”

Manajemen menurut Effendi (2015:1) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi social, organisasi pemerintah dan sebagainya. Robbins dan Coulter (2016:5) mengemukakan bahwa manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) pengelolaan

atau kelola memiliki arti mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya) dan/atau proses, cara, perbuatan mengelola dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlita dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan pengelolaan yaitu suatu proses yang berkaitan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengatur sumber daya organisai secara optimal guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan agar berjalan efektif dan efisien.

2.1.4.2 Fungsi Pengelolaan

Menurut Robbins dan Coulter (2016:9) fungsi Manajemen terdiri dari sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*) merupakan sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya.
3. Kepemimpinan (*Leading*) yaitu memotivasi, memimpin, dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang-orang lain.
4. Pengendalian (*Controlling*) yaitu memantau aktivitas-aktivitas demi mamastikan segala sesuatunya terealisasikan sesuai rencana.

2.1.4.3 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

2.1.4.4 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan Desa yaitu Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Berdasarkan beberapa teori diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa yaitu proses penyelenggaraan pemerintah yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan agar berjalan efektif dan efisien

2.1.4.5 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan..
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

2.1.4.6 Struktur Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. PPKD terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

2.1.4.7 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. berita acara hasil musyawarah BPD.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- c. Rencana Anggaran Biaya.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA yang terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
- b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa. Rancangan RAK Desa sebagaimana disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. buku pembantu bank;
- b. buku pembantu pajak; dan
- c. buku pembantu panjar.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b. laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - i. laporan realisasi APB Desa; dan
 - ii. catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan; dan
- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dibuat untuk mempermudah penelitian sesuai dengan tujuan melakukan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul, dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Maka dengan itu yang dulunya pengelolaan keuangan desa bersifat sentralisasi kini pengelolaan keuangan bersifat desentralisasi dimana pengelolaannya pun sudah sama seperti pengelolaan ditingkat pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan kompetensi yang dimiliki dari aparatur desanya itu sendiri. Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting dan menjadi sebuah kontrol penuh aparatur desa atas segala sesuatu yang

telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan sehingga peran pemerintah desa selaku agen yang mengelola keuangan desa menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan kepada prinsipal atau masyarakat. Untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel diperlukan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa. Aparatur desa harus mempunyai keterampilan, pengetahuan, sikap yang dimana itu semua merupakan indikator dari kompetensi itu sendiri. Dan dapat dikatakan akuntabilitas tercapai jika aparatur desa telah melaksanakan akuntabilitas secara hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan itu semua merupakan indikator dari akuntabilitas itu sendiri. Jika aparatur desa telah memenuhi itu semua maka, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat terwujud dengan baik.

Penelitian yang sejenis dengan variabel penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Arif Widyatama,dkk (2107) bahwa Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD. Persamaannya penelitian sama-sama membahas yaitu variabel kompetensi aparatur dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, perbedaannya terletak pada objek dalam penelitian.

Penelitian Dwi Saptiningsih,dkk (2018) bahwa ada pengaruh positif yang signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana desa. Ada pengaruh positif yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ada sebuah pengaruh positif yang signifikan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas

pengelolaan Dana desa. Ada pengaruh positif yang signifikan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaannya penelitian sama-sama membahas yaitu variable kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, perbedaanya terletak pada objek dalam penelitian.

Penelitian Siti Umaira dan Adnan (2019) bahwa partisipasi publik,kompeteknsi sumber daya manusia, dan variabel pengawasan baik secara parsial atau simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaannya penelitian sama-sama membahas yaitu variable kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, perbedaanya terletak pada objek dalam penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mualifu,dkk (2019) bahwa transparansi, kompetensi, sisitem pengeendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Persamaannya penelitian sama-sama membahas yaitu variable kompetensi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa perbedaanya terletak pada objek dalam penelitian.

Penelitian yang dilakukan Amanda Mutiara Sweetenia,dkk (2019) bahwa Pengendalian Internal Sistem dan kualitas penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan ADD di Kabupaten Magelang. Sementara itu, kompetensi tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Persamaannya penelitian sama-sama membahas yaitu

variable kompetensi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa perbedaanya terletak pada objek dalam penelitian.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya juga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Widyatama,dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	X1:Kompetensi X2:Sistem Pengendalian Internal Y: Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD.
2.	Sapartiningsih,dkk (2018)	Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan	X1:Kompetensi Sumber Daya Manusia X2:Pemanfaatan Teknologi Informasi X3: Partisipasi Penganggaran X4: Pengawasan Y: Akuntabilitas pengelolaan	Dari hasil Penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan kompetensi sumber daya manusia

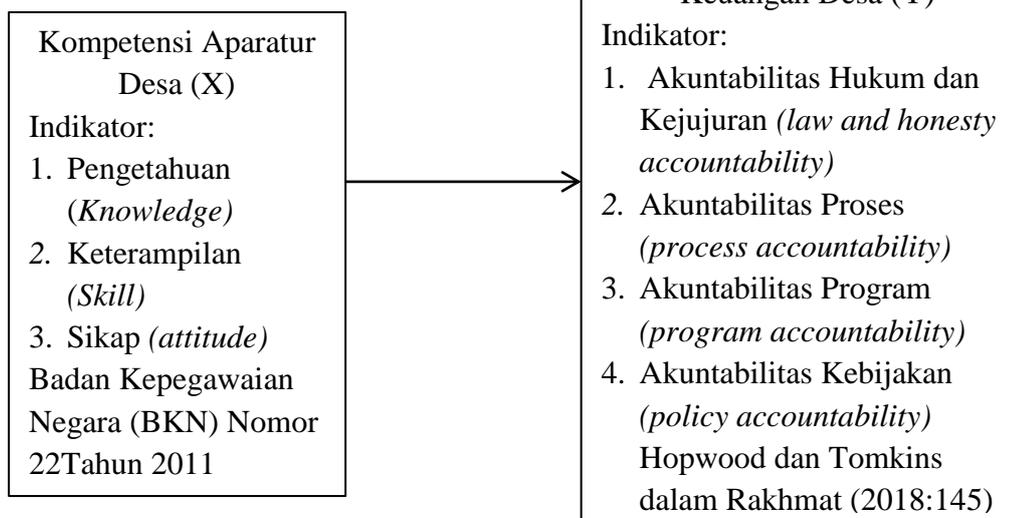
No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	dana Desa	terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana desa. Ada pengaruh positif yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ada sebuah pengaruh positif yang signifikan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana desa. Ada pengaruh positif yang signifikan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3.	Umaira dan Adnan (2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus	X1 : Partisipasi Masyarakat X2:Kompetensi Sumber Daya Manusia X3:Pengawasan Y :Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi publik (X1), kompetensi sumber daya manusia(X2), dan variabel pengawasan (X3) baik secara parsial

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)		atau simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).
4.	Mualifu dkk. (2019)	Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)	X1:Transpransi X2:Kompetensi X3: Sistem Pengendalian Internal X4: Komitmen Organisasi Y: Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi, kompetensi, sisitem pengeendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Sweetenia dkk. (2019)	Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa	X1 :Kompetensi X2 : Sistem Pengendalian Internal X3: Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Y :Akuntabilitas Pemerintah Desa	hasilnya menunjukkan bahwa Pengendalian Internal Sistem dan kualitas penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan ADD di Kabupaten Magelang. Sementara itu, kompetensi tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan maka paradigma

penelitian dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan pada teori di atas dan hubungan antara variabel yang telah dikemukannya sebelumnya, dapat dibuat hipotesis yaitu “Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variable tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

3.1.1 Gambaran Umum

3.1.1.1 Visi dan Misi Kecamatan Tanjungsari

A. Visi Kecamatan Tanjungsari

Terwujudnya Kecamatan Tanjungsari Yang “Tentram” Tertib, Nyaman, Terampil, Resik, Agamis, Mandiri. Visi tersebut memiliki makna Kecamatan Tanjungsari mampu mengangkat dan menonjolkan keunggulannya baik dari segi pemerintahan, hasil pembangunan, kegiatan kemasyarakatan sehingga tercipta keunggulan spesifik/terdapat nilai-nilai khusus yang menjadi ciri khas Kecamatan Tanjungsari:

- **Tertib**, mengandung makna kehidupan Tanjungsari yang tertata dengan baik, serta masyarakatnya yang taat pada peraturan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat;

- **Nyaman**, ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat Kecamatan Tanjungsari yang dapat memenuhi standar kelayakan dalam pemenuhan di bidang pendidikan, ekonomi dan jaminan keamanan dengan senantiasa mempertimbangkan kelestarian daya dukung lingkungan yang berkelanjutan;
- **Terampil**, mencerminkan kondisi masyarakat Tanjungsari yang apik, pekerja keras, kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada menjadi berdaya guna dan berhasil guna;
- **Resik**, tidak hanya dalam arti harfiah yang mencakup bersih, teratur dan terawat tetapi juga mencakup resik individu, keluarga dan kelompok masyarakat dengan pengertian mengandung pengertian bersih, damai, bersahabat, dan mempertahankan gotong royong dan kerjasama ditambah dengan situasi dimana segalanya sudah sesuai dengan peraturan yang ada;
- **Agamis**, artinya berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsari kental dengan suasana yang agamis. Pola relasi kehidupan masyarakat Tanjungsari dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai keyakinan masyarakat;
- **Mandiri**, kemampuan masyarakat Kecamatan Tanjungsari dalam mengelola potensi sumberdaya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing untuk mencapai kesejahteraan;

B. Misi Kecamatan Tanjungsari

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber daya utama pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan,
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa belandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

3.1.1.2 Kondisi Eksisting Kecamatan Tanjungsari

Kecamatan Tanjungsari merupakan salah satu daerah bagian Kabupaten Sumedang di wilayah Barat, memiliki luas 34,62 km² (3.462 Ha) dengan jarak antara wilayah dari arah Utara ke Selatan sepanjang 8,5 km dan dari arah Barat ke Timur sepanjang 4,07 km. Jarak ke ibu kota Kabupaten Sumedang ± 18 km dan jarak ke Ibu Kota Propinsi Jawa Barat Bandung ± 24 km.

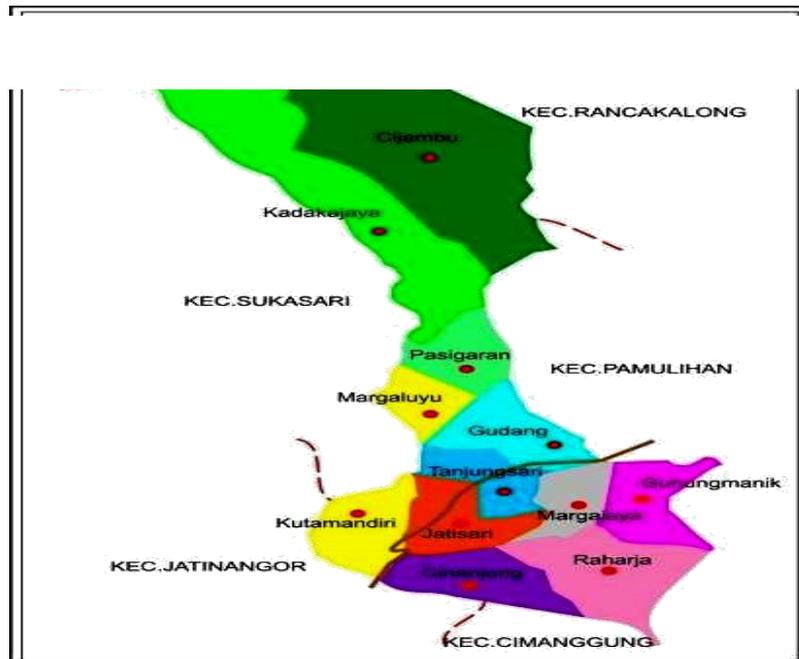
Secara administratif Kecamatan Tanjungsari terbagi kedalam 12 desa, 40 dusun, 143 Rukun Warga (RW) dan 490 Rukun Tetangga (RT), dengan batas-batas wilayah administratif pemerintahannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Rancakalong-Kecamatan Pamulihan
- Sebelah Timur : Kecamatan Pamulihan-Kecamatan Cimanggung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cimanggung-Kecamatan Jatinangor
- Sebelah Barat : Kecamatan Sukasari-Kecamatan Jatinangor

Secara topografi Kecamatan Tanjungsari sebagian besar merupakan perbukitan dan pegunungan rendah dengan ketinggian antara 500 – 2000 meter di atas permukaan laut (dpl).

Sebagian wilayah berada pada ketinggian antara 501 – 1000 meter dpl dengan luas mencapai 25,04 km² atau sekitar 72,41% dari seluruh luas Kecamatan Tanjungsari. Curah hujan rata-rata cukup tinggi yaitu mencapai ± 185 mm per tahun, dengan jumlah efektif hujan antara 20 – 146 hari. Lama penyinaran matahari termasuk sedang yaitu rata-rata 62,5% dan suhu udara juga termasuk sedang dengan rata-rata berkisar antara 21,5-25⁰C.

Dilihat dari penggunaan lahannya, sebagian besar wilayah merupakan lahan tegal/ladang yang mencapai 1160,46 ha, Hutan mencapai 1132,53 ha terdiri atas hutan rakyat dan hutan negara. Sedangkan luas penggunaan lahan lainnya berupa lahan persawahan dengan luas 634,52 ha, pekarangan seluas 745,68 ha, dan lain-lainnya 166,61 ha.



Gambar 3.1 Peta Kecamatan Tanjungsari

Sumber : Data Base Profil Kecamatan Tanjungsari

Tabel 3.1 Kawasan Desa lingkup Kecamatan Tanjungsari

Kecamatan	Desa	Luas Desa (Ha)
Tanjungsari	Tanjungsari	64,7
	Jatisari	81,6
	Gudang	165,5
	Margaluyu	133,552
	Kadakajaya	342,63
	Cinanjung	373
	Pasigaran	284
	Cijambu	1365,75
	Kutamandiri	186,790
	Raharja	367,615
	Margajaya	230,548
	Gunungmanik	245,680

Sumber : Data Base Profil Kecamatan Tanjungsari

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2019) metode pendekatan deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau *generalisasi*.

Menurut Sugiyono (2019) metode pendekatan verifikatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Dalam penelitian ini pendekatan deskriptif dan verifikatif digunakan untuk mengetahui gambaran dan pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada 12 desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

3.2.2 Oprasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang) maka variabel yang akan diungkap dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Bebas(X)

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang keberadaanya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Menurut Sugiyono (2017:39) variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kompetensi aparatur desa.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Menurut Sugiyono (2017:39) variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator yang digunakan	Skala	Item Kuesioner
Variabel kompetensi aparatur desa (X)	Kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (<i>skill</i>), pengetahuan (<i>knowledge</i>), dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Menurut Wyatt dalam Suparyadi (2015:243)	Kompetensi aparatur desa berdasarkan: 1. Pengetahuan (Knowledge) 2. Keterampilan (Skill) 3. Sikap (attitude) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 22 Tahun 2011	Interval	1-17
Variabel akuntabil	Akuntabilitas adalah Suatu	Akuntabilitas pengelolaan		

Variabel	Konsep Variabel	Indikator yang digunakan	Skala	Item Kuesioner
<p>itas pengelola an keuangan desa (Y)</p>	<p>bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.</p> <p>Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:28). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa dikelola</p>	<p>keuangan desa berdasarkan:</p> <p>1.Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran</p> <p>2.Akuntabilitas Proses Akuntabilitas Program</p> <p>4. Akuntabilitas Kebijakan Menurut Hopwood dan Tomkins dalam Rakhmat (2018:145)</p>	<p>Interval</p>	<p>18-30</p>

Variabel	Konsep Variabel	Indikator yang digunakan	Skala	Item Kuesioner
	berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.			

Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam ukuran tertentu yang telah ditetapkan pada alternatif jawaban dari kuisisioner. Pengajuan pernyataan-pernyataan tersebut disertai dengan jawaban yang disusun berdasarkan skala semantik defferensial. Menurut Sugiyono (2019) skala smantik defferensial digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun *checklist*, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawabannya “sangat positifnya” terletak dibagian kanan garis sedangkan “sangat negatifnya” terletak dibagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan skala ini digunakan untuk mengukur sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang.

3.2.3 Populasi

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh aparatur desa yang ada di 12 desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Daftar Aparatur Desa di 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari

No	Nama Desa	Jumlah Aparatur Desa
1.	Desa Cijambu	11 Orang
2.	Desa Kadakajaya	12 Orang
3.	Desa Jatisari	11 Orang
4.	Desa Raharja	11 Orang
5.	Desa Margajaya	11 Orang
6.	Desa Gunung Manik	11 Orang
7.	Desa Tanjungsari	11 Orang
8.	Desa Pasigaran	11 Orang
9.	Desa Gudang	11 Orang
10.	Desa Cinanjung	12 Orang
11.	Desa Margaluyu	11 Orang
12.	Desa Kuta Mandiri	12 Orang
Jumlah		135 Orang

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

3.2.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2019). Menurut Sugiyono (2019) selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik Adapun teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara),

kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2019) kuesioner (angket) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden.

3.2.4.2 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer. Menurut Sugiyono (2019) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil jawaban responden atau kuesioner yang telah diajukan.

3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.2.5.1 Uji Instrumen

Menurut Sugiyono (2019) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social memang ada yang sudah tersedia dan telah teruji validitas dan reabilitasnya, seperti instrument untuk mengukur motif berprestasi, untuk mengukur sikap, mengukur OQ, mengukur bakat, dan lain-lain, namun terdapat juga penelitian social yang keabsahannya dan keasliannya sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dari instrument tersebut dapat menjamin mutu dari penelitian, sehingga kesimpulan-kesimpulan atau alasan-alasan yang dikemukakan terhadap hubungan-hubungan antar variabel dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan sehingga hasil penelitian dapat

diterima. Dimana instrument dikatakan memenuhi persyaratan sebagai alat pengumpul data jika instrument tersebut valid dan realibel.

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019) validitas merupakan ketepatan atau ketelitian alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) apa yang seharusnya diukur. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mengukur apa yang perlu diukur. Validitas juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan sudah tepat.

Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi product moment pearson yang dirumuskan sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N(\sum X^2) - (\sum X)^2)(N(\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Sumber: Sugiyono (2019)

Keterangan:

R_{xy} = Koefisien Korelasi antara variabel X dan Y

N = Jumlah Responden

$\sum X$ = Jumlah skor X

$\sum Y$ = Jumlah skor Y

$\sum XY$ = Jumlah hasil kali skor X dan Y

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor X

$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat skor Y

Jika t hitung $> t$ table dengan $\alpha = 0,196$ maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya jika t hitung $< t$ table maka alat ukur tersebut tidak valid..

b. Uji Reliabilitas

Sebuah alat ukur atau pertanyaan dalam angket dikategorikan reliabel (andal), jika alat ukur yang digunakan dapat mengukur secara konsisten atau stabil meskipun pertanyaan tersebut diajukan dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Menurut Ghozali (2018:47) realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Sedangkan Sugiyono (2019) menyatakan realibilitas adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pada penelitian ini untuk menguji realibilitas digunakan *one shot* atau pengukuran sekali saja.

Siregar (2015:90) menyatakan uji realibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *alpha cronbach's* dengan kriteria uji *alpha cronbach's* $> 0,6$ maka instrument tersebut dikatakan realibel. Standar penilaian untuk realibilitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Nilai dan Tingkat Realibilitas

Alpha	Tingkat Reabilitas
0,00 – 0,20	Tidak Reliabel
0,201 – 0,40	Kurang Reliabel
0,401 – 0,60	Cukup Reliabel
0,601 – 0,80	Reliabel
0,801 – 1,00	Sangat Reliabel

Sumber: (Sugiyono,2019)

3.2.5.2 Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut Sugiyono (2019) analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2019) regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linier sederhana adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis regresi linier sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y= Variabel terikat (subjek dalam variabel dependent)

X = Variabel bebas (subjek dalam variabel independent)

a = Nilai konstanta

b = koefisien arah regresi (kemiringan)

Dimana nilai a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

b. Koefisien Korelasi

Ghozali (2018) menyatakan analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi pearson digunakan untuk mencari kedekatan hubungan dua variabel atau lebih yang memiliki skala pengukuran berupa skala ordinal. Rumus korelasi *pearson* adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N(\sum X^2) - (\sum X)^2)(N(\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi antara variabel X dan Y

N = Jumlah Responden

$\sum X$ = Jumlah skor X

$\sum Y$ = Jumlah skor Y

$\sum XY$ = Jumlah hasil kali skor X dan Y

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor X

$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat skor Y

Dari koefisien yang dihasilkan dapat diinterpretasikan korelasi antara kedua variabel yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Korelasi Pengaruh Antara kedua Variabel

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2019)

c. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam presentase. Menurut Ghazali (2018:97) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi

r = Koefisien korelasi

d. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, maka digunakan statistik uji t. Sugiono (2019) menyatakan uji t merupakan pengujian koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Rumus uji t sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta}{se(\beta)}$$

Sumber: Ghozali dan Ratmono (2018)

Keterangan:

β = Koefisien Regresi (Beta)

se = Standar Error Beta

Uji t hitung hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t table dengan menggunakan tingkat kesalahan 5%. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Ho diterima jika nilai t hitung \leq t tabel
2. Ho ditolak jika nilai t hitung \geq t tabel

Bila terjadi penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

Ho: $\beta_1=0$, tidak adanya pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

H₁: $\beta_1\neq 0$, adanya pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini hasil pengolahan data dan pembahasan diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden sebagai sumber data. Responden terdiri dari seluruh aparatur desa di 12 desa di Kecamatan Tanjungsari yaitu terdiri dari 135 orang responden. Dalam penelitian ini kuesioner terdiri dari 30 pertanyaan yang diuraikan berdasarkan variabel kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Proses penelitian ini dilakukan selama 8 hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2019 hingga 30 Desember 2019. Jumlah kuesioner yang dibagikan sesuai dengan jumlah responden yaitu sebanyak 135 responden dan yang kembali sesuai dengan kuesioner yang dibagikan yaitu sesuai dengan jumlah responden sebanyak 135 responden.

Sebelum data hasil penelitian diolah, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan terhadap kualitas alat ukur penelitian (kuesioner) yang digunakan. Dimana instrument dikatakan memenuhi persyaratan sebagai alat ukur penelitian jika instrument tersebut dinyatakan valid dan realibel.

4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur valid tidaknya suatu instrument mampu mengungkapkan sesuatu yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut dan memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besai dari titik kritis. Indeks validitas dihitung menggunakan korelasi *product moment*. Butir

pertanyaan dinyatakan valid ketika koefisien korelasinya lebih besar dari r table untuk $n-2 = 135-2 = 133 = 0,1690$.

Variabel kompetensi apratur desa (X) diukur dengan 17 pernyataan.

Berikut adalah hasil uji validitas untuk variabel kompetensi aparatur desa (X):

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Nilai Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X)

No Item	Koefisien Korelasi (r)	Nilai r_{kritis}	Kesimpulan
1	0,735	0,1690	Valid
2	0,732	0,1690	Valid
3	0,676	0,1690	Valid
4	0,778	0,1690	Valid
5	0,736	0,1690	Valid
6	0,718	0,1690	Valid
7	0,767	0,1690	Valid
8	0,635	0,1690	Valid
9	0,733	0,1690	Valid
10	0,688	0,1690	Valid
11	0,783	0,1690	Valid
12	0,756	0,1690	Valid
13	0,726	0,1690	Valid
14	0,768	0,1690	Valid
15	0,703	0,1690	Valid
16	0,702	0,1690	Valid
17	0,749	0,1690	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Hasil perhitungan pada table 4.1 menunjukkan nilai korealsi untuk masing-masing item kuesioner variabel kompetensi aparatur desa (X) lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,1690 ($r > 0,1690$). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner

variabel kompetensi aparatur desa dapat disimpulkan dinyatakan valid dan dapat mengukur kompetensi aparatur desa yang diteliti.

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) diukur dengan 13 pernyataan. Berikut adalah hasil uji validitas untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y):

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Nilai Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

No Item	Koefisien Korelasi (r)	Nilai r_{kritis}	Kesimpulan
1	0,839	0,1690	Valid
2	0,719	0,1690	Valid
3	0,782	0,1690	Valid
4	0,680	0,1690	Valid
5	0,613	0,1690	Valid
6	0,652	0,1690	Valid
7	0,737	0,1690	Valid
8	0,724	0,1690	Valid
9	0,713	0,1690	Valid
10	0,437	0,1690	Valid
11	0,659	0,1690	Valid
12	0,723	0,1690	Valid
13	0,743	0,1690	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Hasil perhitungan pada table 4.2 menunjukkan nilai korealsi untuk masing-masing item kuesioner variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,1690 ($r > 0,1690$). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) dapat disimpulkan dinyatakan valid dan dapat mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang diteliti.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji konsistensi alat ukur digunakan metode *cronbach's alpha* suatu variabel dapat diterima atau dinyatakan *reliable* jika memiliki koefisien reabilitas yang lebih besar dari 0,6. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *cronbach's alpha* diperoleh hasil uji reliabilitas kuesioner masing-masing variable sebagai berikut:

Table 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,943	17

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Dari table 4.3 menunjukkan nilai reliabilitas *cronbach's alpha* untuk variabel kompetensi aparatur desa (X) sebesar 0,943. Dimana nilai realibilitas variabel kompetensi aparatur desa lebih besar dari 0,6 dan dinyatakan *reliable*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner variabel kompetensi aparatur desa (X) sudah memiliki tingkat keandalan (kekonsistenan) untuk dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Table 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,912	13

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Dari table 4.4 menunjukkan nilai reliabilitas *cronbach's alpha* untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 0,912. Dimana nilai realibilitas variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa lebih besar dari 0,6

dan dinyatakan *reliable* Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah memiliki tingkat keandalan (kekonsistenan) untuk dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

4.1.3 Gambaran Umum Responden

Penelitian dilakukan pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan menyebar keusioner kepada 135 responden yaitu aparatur desa itu sendiri. Berikut ini gambaran umum responden, untuk mengetahui karakteristik dari aparatur desa peneliti mengelompokan berdasarkan jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, dan masa bekerja. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
Laki-Laki	117	86,6%
Perempuan	18	13,3%
Total	135	100%

Sumber:Hasil Pengolahan Data (2020)

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden terdiri dari laki-laki dengan presentase 86,6% dan 13,3% terdiri dari responden perempuan.

Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Responden	Presentase
<30 Tahun	22	16,3%
>40 Tahun	68	50,4%
30 s/d 40 Tahun	45	33,3%
Total	135	100%

Sumber:Hasil Pengolahan Data (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak berada di kelompok umur >40 tahun yaitu sebesar 50,4% dan responden dengan kategori <30 tahun memiliki presentase paling sedikit yaitu 16,3%.

Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
SMP	12	8,9%
SMA	106	78,5%
D3	3	2,2%
S1	14	10,4%
S2	0	0%
Total	135	100%

Sumber:Hasil Pengolahan Data (2020)

Dilihat dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan responden dengan presentase tertinggi yaitu berada pada jenjang pendidikan SMA dengan presentase 78,5%.

Tebel 4.8 Data Responden Berdasarkan Masa Bekerja

Masa Bekerja	Jumlah Responden	Presentase
<5 Tahun	71	52,6%
5 - 10 Tahun	44	32,6%
>10 Tahun	20	14,8%
Total	135	100%

Sumber:Hasil Pengolahan Data (2020)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa masa bekerja responden dengan kategori <5 tahun memiliki presentase tertinggi yaitu 52,6% dan presentase terendah berada pada kategori masa bekerja >10 tahun yaitu sebesar 14,8%.

4.2 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat gambaran dari hasil penelitian mengenai kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Hasil tanggapan responden untuk setiap variabel akan diuraikan berdasarkan skor dan rata-rata penilaian pada setiap indikator variabelnya. Setiap variabel beserta indikatornya di kategorisasikan berdasarkan nilai presentase skor dan total skor yang diperoleh dari penialain responden. Jawaban responden kemudian dihitung berdasarkan rumus skor aktual dan dibandingkan dengan skor ideal untuk memperoleh nilai presentase dari jawaban responden. Skor aktual diperoleh dari seluruh jawaban responden sesuai bobot yang telah ditentukan sedangkan skor ideal diperoleh dari perolehan nilai tertinggi dikali jumlah seluruh responden. Berikut ini rumus perhitungan presentase skor:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

Setelah diketahui presentase skor yang di dapatkan mencari kriteria presentase penilaian dari setiap jawaban responden. Berikut ini kriteria presentase skor jawaban responden:

Tabel 4.9 Kriteria Presentase Skor Jawaban Responden

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	0,00% - 19%	Tidak Baik
2	20% - 39%	Kurang Baik
3	40% - 59%	Cukup
4	60% - 79%	Baik
5	80% - 100%	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2019:292)

4.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Kompetensi Aparatur Desa di 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

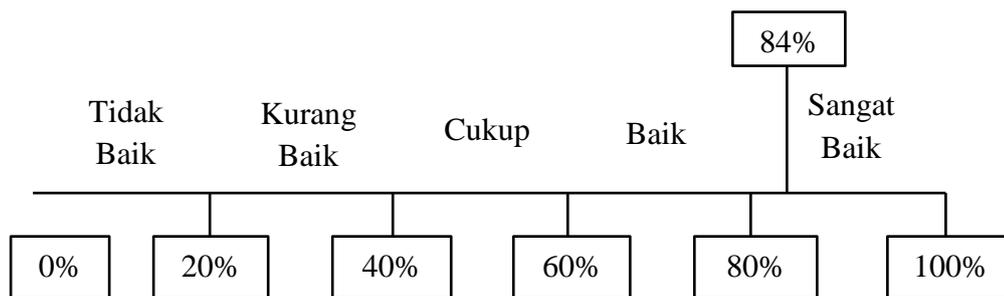
Variabel kompetensi aparatur desa terdiri dari 3 indikator meliputi 17 pernyataan yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan tanggapan responden mengenai kompetensi aparatur desa:

Tabel 4.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kompetensi Aparatur Desa

No Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
	5	4	3	2	1				
1	70	51	11	3	0	135	593	675	88%
2	43	64	17	9	2	135	542	675	80%
3	75	48	12	0	0	135	603	675	89%
4	60	55	15	4	1	135	574	675	85%
5	30	82	22	1	0	135	546	675	81%
6	86	26	19	3	1	135	598	675	89%
7	72	37	23	2	1	135	582	675	86%
8	34	63	30	6	2	135	526	675	78%
9	39	71	22	3	0	135	551	675	82%
10	64	60	10	0	1	135	591	675	88%
11	34	75	23	3	0	135	545	675	81%
12	46	69	18	2	0	135	564	675	84%
13	73	49	10	2	1	135	596	675	88%
14	40	69	23	2	1	135	550	675	81%
15	85	45	4	1	0	135	619	675	92%
16	41	73	19	2	0	135	558	675	83%
17	34	84	13	3	1	135	552	675	82%
Total							9690	11475	84%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Skor tanggapan 135 responden atas 17 pernyataan mengenai kompetensi aparatur desa diperoleh hasil total sebesar 9690 dengan presentase skor 84%. Hasil tanggapan responden tersebut masuk ke dalam kategori sebagai berikut:



Gambar 4.1 Interval Skor Penilaian Kompetensi Aparatur Desa

Dari tabel 4.10 dan gambar 4.1 menunjukkan kompetensi aparatur desa di Desa-Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang berdasarkan penilaian aparatur desa terhadap 17 pertanyaan mengenai variable kompetensi aparatur desa, didapatkan hasil 84%, angka tersebut berada pada interval 80% - 100% dan termasuk kategori sangat baik.

4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terdiri dari 4 indikator meliputi 13 pernyataan. Berikut ini merupakan tanggapan responden mengenai kompetensi aparatur desa:

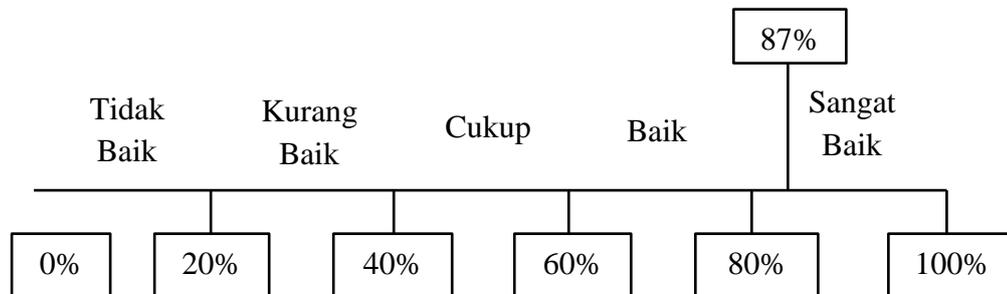
Tabel 4.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

No Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
	5	4	3	2	1				
1	55	50	27	2	1	135	561	675	83%
2	64	53	17	1	0	135	585	675	87%
3	70	52	12	1	0	135	596	675	88%
4	81	47	6	1	0	135	613	675	91%
5	60	62	12	1	0	135	586	675	87%
6	55	62	17	1	0	135	576	675	85%
7	67	56	9	3	0	135	592	675	88%
8	71	53	10	1	0	135	599	675	89%
9	30	80	22	3	0	135	542	675	80%

No Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
	5	4	3	2	1				
10	70	57	7	1	0	135	601	675	89%
11	87	42	5	1	0	135	620	675	92%
12	67	50	17	1	0	135	588	675	87%
13	54	62	19	0	0	135	575	675	85%
Total							7634	8775	87%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Skor tanggapan 135 responden atas 13 pernyataan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa diperoleh hasil total sebesar 7634 dengan presentase skor 87%. Hasil tanggapan responden tersebut masuk ke dalam kategori sebagai berikut



Gambar 4.2 Interval Skor Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari tabel 4.11 dan gambar 4.2 menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang berdasarkan penilaian aparatur desa terhadap 13 pertanyaan mengenai variable akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, didapatkan hasil 87%, angka tersebut berada pada interval 80% - 100% dan termasuk kategori sangat baik

4.2.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

4.2.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diuji menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Koefisien Regresi X terhadap Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,187	2,835		7,121	0,000
	Kompetensi_Aparatur_Des a	0,510	0,039	0,746	12,935	0,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Desa

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah:

$$Y = 20,187 + 0,510X$$

Keterangan:

Y= Variabel terikat (subjek dalam variabel dependent)

X = Variabel bebas (subjek dalam variabel independent)

a = Nilai konstanta

b = koefisien arah regresi (kemiringan)

Koefisien yang terdapat pada persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$a = 20,187$ artinya diperoleh nilai konstanta (a) di atas sebesar 20,187. Jika variabel bebas (kompetensi aparatur desa) bernilai konstan nol maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan bernilai sebesar 20,187 $\beta = 0,510$ artinya koefisien regresi kompetensi aparatur desa (X) bernilai sebesar 0,510. Peningkatan penilaian kompetensi aparatur desa satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,51. Jadi semakin baik kompetensi aparatur desa akan diikuti dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4.2.3.2 Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi berfungsi untuk mengukur kuatnya hubungan antara variabel bebas (kompetensi aparatur desa) dengan variabel terikat (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa). Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13 Koefisien Korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.746 ^a	0,557	0,554	4,190
a. Predictors: (Constant), Kompetensi_Aparatur_Desa				

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Berdasarkan tabel 4.13 nilai R sebesar 0,746 pada output di atas menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel yaitu kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nilai korelasi sebesar 0,746 jika mengacu pada kriteria yang telah ditentukan yaitu menurut Sugiyono (2019) maka termasuk kedalam hubungan yang kuat karena berada pada interval 0,60 – 0,799. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat

antara kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4.2.3.4 Korelasi Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini yaitu pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil yang diperoleh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.14 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.746 ^a	0,557	0,554	4,190
a. Predictors: (Constant), Kompetensi_Aparatur_Desa				

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh hasil bahwa R Square sebesar 0,557 atau 55,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa secara simultan dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 55,7% dan sisanya sebesar $100\% - 55,7\% = 44,3\%$ dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

4.2.3.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang nyata dari kompetensi aparatur desa secara parsial (individu) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,187	2,835		7,121	0,000
	Kompetensi_Aparatur_Desa	0,510	0,039	0,746	12,935	0,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Desa

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Dari tabel 4.15 diperoleh hasil perhitungan statistik uji t sebesar 12,935 dengan nilai signifikansi 0,000.

Hipotesis yang akan diuji:

$H_0: \beta_1 = 0$, kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

$H_1: \beta_1 \neq 0$, kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dari tabel t diperoleh nilai t_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n - k - 1 = 135 - 1 - 1 = 133$, diperoleh t_{tabel} sebesar 1,97796 berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $12,935 > 1,97796$ maka dapat diambil keputusan hasil pengujian H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kompetensi Aparatur Desa Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 3 indikator atas 17 pertanyaan yang di sebarakan kepada 135 responden memiliki presentase 84% dan masuk dalam kategori sangat baik.. Hal itu menunjukkan bahwa aparatur desa yang ada di 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari sudah memiliki pengetahuan (*knowledge*) dimana pengetahuan itu meliputi pengetahuan kegiatan sector public serta pengorganisasiannya, memahami prosedur kerja serta aturan yang berlaku. Kemudian keterampilan (*skill*), keterampilan ini meliputi keterampilan teknis dan fungsional, ketearampilan intelktual, keterampilan berorganisasi, keterampilan personal serta keterampilan komunikasi. Dan yang terakhir sikap (*attitude*) dimana sikap meliputi memiliki komitmen dan sensitifitas terhadap tanggungjawab social, pengembangan diri dan belajar terus menerus, dapat diandalkan, bertanggungjawab, tepat waktu dan saling menghargai hukum dan peraturan berlaku. Dimana itu semua menjadi landasan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparatur desa agar tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Itu semua sesuai dengan teori yang kemukakan oleh Wyatt dalam Suparyadi (2015:243). Dimana indikator pengetahuan memiliki presntase tertinggi sedangkan presentase terendah berada pada indokator keterampilan.

Namun jika dilihat dari jawaban responden secara satu per satu atas pernyataan yang telah diberikan mengenai kompetensi aparatur desa masih terdapat beberapa responden yang menjawab rendah atas beberapa pernyataan,

yang berarti meskipun secara keseluruhan kompetensi aparatur desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang termasuk dalam kategori sangat baik namun dengan itu masih menunjukkan adanya kelemahan dimana kelemahan tersebut yaitu dalam hal penggunaan teknologi komputerisasi, maka dari itu perlunya ada peningkatan dalam kelemahan tersebut agar dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal.

4.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 4 indikator atas 13 pertanyaan yang di sebarakan kepada 135 responden memiliki presentase 87% dan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa aparatur desa sudah melakukan tugasnya sesuai dengan akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*), akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Kemudian akuntabilitas proses terkait dengan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan akuntabilitas sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive,

dan biaya murah. Lalu akuntabilitas program (*program accountability*) yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal, lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Serta akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) ini berkaitan dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan memepertimbangkan dampak di masa depan. Sesuai teori yang dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins dalam Rakhmat (2018:145).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Sesuai teori yang dikemukakan Kusumastuti (2014). Dimana indikator akuntabilitas proses memiliki presntase tertinggi sedangkan presentase terendah berada pada indokator akuntabilitas kebijakan.

Meskipun akuntabilitas pengelolaan keuangan termasuk kedalam kategori sangat baik, tidak semua responden menjawab dengan pilihan skor tertinggi masih terdapat beberapa responden yang menjawab rendah atas pernyataan yang di berikan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa itu semua dilihat dari jawaban reaponden secara satu per satu pernyataan. Hal ini berarti masih adanya kelemahan yang masih harus ditingkatkan dalam akuntabilitas pengelolaan desa

meskipun secara keseluruhan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dikategorikan sangat baik.

4.3.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Banerdasarkan hasil pengujian analisi regresi linier sederhana diperoleh hasil peningkatan penilaian kompetensi aparatur desa satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,510. Jadi semakin baik kompetensi aparatur desa akan diikuti dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya hasil koefisien korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kemudian hasil koefisien determinasi diperoleh hasil besarnya pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yaitu 55,7% dan sisanya $100\% - 55,7\% = 44,3\%$ dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan Dan hasil uji t diperoleh hasil bahwa H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi aparatur desa dap dewsat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang termasuk kedalam kategori sangat baik. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin baik kompetensi

yang dimiliki oleh aparatur desa maka semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi aparatur desa dapat dikategorikan sangat baik karena dilihat dari latar belakang aparatur desa mengenai pengetahuan (*knowledge*) keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*) yang dimilikinya. Aparatur desa di Desa-desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang sudah memiliki pengetahuan (*knowledge*) keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*) yang itu merupakan dasar dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur desa. Meskipun dalam hal keterampilan (*skill*) masih memerlukan pelatihan agar dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal. Dengan adanya kompetensi yang sangat baik yang dimiliki oleh aparatur desa maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pun akan terealisasi dengan baik. Karena akuntabilitas dapat dikatakan sangat baik apabila aparatur desa telah melaksanakan akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*), akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Hopwood dan Tomkins dalam Rakhmat (2018:145).

Dan itu semua dapat terealisasi apabila aparatur desa memiliki kompetensi yang baik yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*) sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat terealisasi dengan baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari semua aktivitas yang telah dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa pada 12 Desa di Kecamatan

Tanjungsari Kabupaten Sumedang termasuk kedalam kategori sangat baik sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pun dapat terlealisasi dengan optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019), Sapartiningsih dkk. (2018) dan Muallifu dkk. (2019).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif mengenai Kompetensi Aparatur Desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang masuk kedalam kategori sangat baik, Pada indikator pengetahuan mendapatkan presentase tertinggi yang berarti dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur desa, aparatur desa mempunyai pengetahuan yang mempunyai untuk mendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur desa. Dan indikator keterampilan mendapatkan presentase terendah dapat dilihat juga pada pernyataan aparatur desa memiliki keterampilan yang memadai dalam penggunaan teknologi komputer ini menunjukkan presentase terendah dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa kelemahan aparatur desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yaitu dalam hal keterampilan yang dimiliki oleh aparatur desa.
2. Hasil analisis deskriptif mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang tergolong dalam kategori sangat baik . Dimana dalam hal akuntabilitas kebijakan ini

memiliki presentase terendah dan dalam akuntabilitas program mendapatkan presentase tertinggi. Namun dilihat dari pernyataan secara satu persatu aparatur desa melaksanakan program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal ini mendapatkan presentase terendah dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan lainnya.

3. Kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 55,7%. Berpengaruh karena kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa sangat baik sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pun dapat terealisasi dengan optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang maka peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu

1. Kompetensi Aparatur Desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang sudah sangat baik, namun penelitin menyarankan dalam hal keterampilan aparatur desa lebih ditingkatkan lagi dengan adanya pelatihan untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas sehingga menghasilkan pula hasilyang lebih optimal.
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang tergolong dalam kategori sangat baik,

namun peneliti menyarankan dalam hal akuntabilitas kebijakan harus lebih diperhatikan lagi atas kebijakan tersebut dan dampak yang akan ditimbulkan serta dalam melaksanakan program harus lebih dioptimalkan lagi dengan memperhatikan biaya yang digunakan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap . Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada 12 Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang mendapat nilai dengan presentase 55,7%. Dengan ini peneliti menyarankan adanya pengoptimalan dalam hal kompetensi aparatur desa terutama dalam hal keterampilan dengan adanya pelatihan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terealisasi dengan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014), *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Aziz. (2014), *Manajemen*, Bandung: Mardik Group.
- Gholazi, I. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, ed.9, Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://kbbi.web.id/>, diunduh tanggal 3 Desember 2019.
- <https://www.bps.go.id/>, diunduh tanggal 19 Oktober 2019.
- Lukito, P.K. (2014), *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Tentang Demokrasi Kedepan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahmudi. (2015), *manajemen Kinerja Sektor Publik*, ed.2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M., Sulidtiyoti, F. dan Purwanugraha, H.A. (2016), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Moeheriono. (2014), *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mualifu, A.G. dan Hermawan. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa, *Journal Of Economic, Businnes And Engineering*, Vol. 1 No. 1, hlm 449-59.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa.
- Priansa, D. (2017), *Manajemen Kinerja Kepegawaian*, Jakarta: CV Selera.
- Rakhmat. (2018), *Administrasi Dan Akuntabilitas Publik*, Yogyakarta: Andi.

- Saptaningsih, D., Suharno. dan Kristianto, D. (2018), Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 14 No. 1, hlm 100-114.
- Stephen, P.R. dan Coulter, M. (2016), *Manajemen*, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2019), *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, Bandung: Alfabeta CV.
- Suparyadi. (2015), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Surjaweni, V.W. (2015), *Akuntansi Manajemen*, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Sweetenia, A.M., Caesari, E.P.A., Aprillia, A.F. dan Purwantini, A.H. (2019), Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa, *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, Vol. 17 No. 1, hlm 44-56.
- Syotian, S. (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana.
- Umaira, S. dan Adnan. (2019), Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 4 No. 3, hlm 471-481.
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usman, E. (2015), *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo. (2016), *Manajemen Kinerja*, ed.5, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Widyatama, A., Novita, L. dan Diarepati. (2017), Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4 No. 2, hlm 1-20.